

**PENGARUH TATA KELOLA DAN DUKUNGAN POLITIK
TERHADAP PRAKTIK KORUPSI DI PROVINSI ACEH**

TESIS

**MUHAMMAD HASBI ARIFUDDIN
2120519013**

Pembimbing:

Prof. Dr. Werry Darta Taifur, SE., MA.

Dr. Fajri Muharja, SE., M.Si.



**PROGRAM STUDI MAGISTER EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ANDALAS**

2023

PENGARUH TATA KELOLA DAN DUKUNGAN POLITIK TERHADAP PRAKTIK KORUPSI DI PROVINSI ACEH

Oleh: Muhammad Hasbi Arifuddin (2120519013)

Dibimbing oleh:

Prof. Dr. Werry Dartta Taifur, SE., MA.

Dr. Fajri Muharja, SE., M.Si.

Abstrak

Status otonomi khusus di Provinsi Aceh berdampak terhadap peningkatan jumlah dana transfer yang diterima, kewenangan pengelolaan keuangan yang lebih luas bagi pemerintah daerah, dan mendukung pendirian partai politik lokal oleh masyarakat Aceh. Namun, dampaknya terlihat pada tingkat korupsi yang tinggi serta kegagalan dalam mengentaskan kemiskinan di Provinsi Aceh. Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) mengidentifikasi bahwa pemerintah daerah di Provinsi Aceh memiliki risiko korupsi yang tinggi. Tingkat korupsi yang tinggi teridentifikasi dari rendahnya hasil upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Persentase penduduk miskin di Aceh lebih tinggi daripada persentase penduduk miskin nasional. Penelitian ini menggunakan analisis regresi panel binomial negatif untuk mengevaluasi pengaruh tata kelola pemerintah dan dukungan politik terhadap korupsi di 24 pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Aceh (2019-2021). Penelitian ini menggunakan data capaian *Monitoring Center for Prevention* (MCP), nilai temuan audit otonomi khusus, dan capaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) untuk menjelaskan pengaruh tata kelola terhadap praktik korupsi, serta data dukungan politik legislatif dan dukungan politik partai lokal terhadap kepala daerah untuk menganalisis pengaruh dukungan politik terhadap praktik korupsi. Penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan capaian MCP, capaian AKIP, dan dukungan politik partai lokal secara signifikan berpengaruh terhadap penurunan jumlah pelaku korupsi. Sedangkan peningkatan nilai temuan audit otonomi khusus berpengaruh terhadap peningkatan jumlah pelaku korupsi. Sementara dukungan politik legislatif berpengaruh positif pada taraf signifikansi 10 persen. Temuan penelitian ini menekankan pentingnya tata kelola yang efektif dan dukungan politik yang tepat dalam mengurangi tingkat korupsi di Provinsi Aceh.

Kata Kunci: Akuntabilitas; Dukungan Politik; Korupsi; MCP; Otonomi Khusus; Partai Lokal; Tata Kelola; Temuan Audit.

***THE INFLUENCE OF GOVERNANCE AND POLITICAL SUPPORT
ON CORRUPT PRACTICES IN ACEH PROVINCE***

By: Muhammad Hasbi Arifuddin (2120519013)

Supervised by:

Prof. Dr. Werry Dartta Taifur, SE., MA.

Dr. Fajri Muharja, SE., M.Si.

Abstract

Special autonomy status in Aceh Province has resulted in an increase in the amount of transfer funds received, greater financial management authority for local governments, and supported the establishment of local political parties by the people of Aceh. However, this has resulted in high levels of corruption and failure to alleviate poverty in Aceh Province. Corruption Eradication Commission of the Republic of Indonesia (KPK RI) identified that local governments in Aceh Province are at high risk of corruption. The high level of corruption is identified from the low results of efforts to improve public welfare. The percentage of poor people in Aceh is higher than the percentage of poor people nationally. This study uses negative binomial panel regression analysis to evaluate the effect of governance and political support on corruption in Aceh's 24 local governments (2019-2021). This study uses data on Monitoring Center for Prevention (MCP) achievements, special autonomy audit finding scores, and Government Agency Performance Accountability (AKIP) achievements to explain the effect of governance on corrupt practices, and data on legislative political support and local party political support for local heads to analyze the effect of political support on corrupt practices. This study shows that an increase in MCP achievements, AKIP achievements, and local party political support significantly affects the decrease in the number of perpetrators of corruption. Meanwhile, an increase in the value of special autonomy audit findings has an effect on increasing the number of perpetrators of corruption. Meanwhile, legislative political support has a positive effect at the 10 percent significance level. The findings of this study emphasize the importance of effective governance and appropriate political support in reducing corruption levels in Aceh Province.

Keywords: Accountability; Political Support; Corruption; MCP; Special Autonomy; Local Party; Governance; Audit Findings.